



Jurnal SARAQ OPAT, Vol 7 No 1 Januari 2025 97-102

e-ISSN: 2809-8129 ; p-ISSN : 2809-817X

Received 14 Januari 2025 / Revised 30 Juni 2025 / Accepted 24 Juni 2025

Jurnal Administrasi Publik

<https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>

ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Nurul Muflihah¹, Lukman², Andi Nilwana³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Jl. Angkatan 45 No. 1A, Kab. Sidenreng Rappang

Abstrak: Persoalan sampah sampai saat ini juga masih menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten/kota. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah menggunakan wewenangya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan menggunakan teori perilaku masyarakat menurut Sarwono yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan, serta teori implementasi kebijakan menurut Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan jumlah 100 sampel. Data yang diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, akan diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($7,127 > 1,661$) yang artinya perilaku masyarakat berpengaruh signifikan terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Berdasarkan nilai R Square, dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat mempengaruhi implementasi peraturan daerah sebesar 34,1% sedangkan 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keywords: Perilaku Masyarakat; Implementasi Kebijakan

Abstract: The waste problem is still a problem for the district/city government. To overcome the problem of waste management, the Pinrang Regency government has used its authority by establishing Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning waste management. This study aims to determine the effect of community behavior on the implementation of regional regulations concerning waste management in Watang Sawitto District, Pinrang Regency. The study applies Sarwono's theory of community behavior, which includes knowledge, attitude, and action, as well as Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is quantitative. The population in this study consists of residents of Watang Sawitto District, Pinrang Regency, with a sample size of 100 respondents. Data were collected through observation, questionnaires, and literature studies, and processed using IBM SPSS Statistics 25. The results of the t-test show that $t\text{-count} > t\text{-table}$ ($7.127 > 1.661$), indicating that community behavior has a significant effect on the implementation of regional regulations on waste management in Watang Sawitto District, Pinrang Regency. Based on the R Square value, it can be concluded that community behavior influences the implementation of regional regulations by 34.1%, while the remaining 65.9% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Community Behavior; Policy Implementation

1. Introduction

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu pembaharuan sistem bernegara pasca reformasi di negara Indonesia, yaitu perubahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi. Otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, permasalahan yang ada di masyarakat daerah dapat diatasi oleh pemerintah melalui kebijakannya. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk peraturan daerah atau biasa disingkat PERDA sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pembangunan daerah.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pembangunan daerah yaitu lingkungan. Namun sepertinya sampai saat ini salah satu masalah lingkungan yaitu pengelolaan sampah masih sering menjadi masalah ditengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah, berbunyi “pengolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” Pengelolaan sampah dengan baik tidak hanya berdampak baik bagi kesehatan tetapi juga berdampak terhadap keindahan lingkungan.

Persoalan sampah sampai saat ini juga masih menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat (Fildzah, 2023). Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kabupaten Pinrang telah menggunakan wewenangnya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Dalam peraturan daerah tersebut ditegaskan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hal ini tercantum dalam pasal 38 ditegaskan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah; dan
- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengolahan sampah di wilayahnya.

Dilansir dari website *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)* terlihat bahwa jumlah timbulan sampah kabupaten Pinrang mengalami peningkatan setiap tahun, dari 64,570.25 ton pada 2021 menjadi 65,861.77 ton pada 2022, dan mencapai 67,178.98 ton pada 2023 yang artinya belum mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, upaya pengurangan sampah memperlihatkan tren yang fluktuatif: meningkat dari 14,182.80 ton pada 2021 ke 15,251.54 ton pada 2022, tetapi menurun signifikan menjadi 11,385.64 ton pada 2023. Di sisi lain, penanganan sampah menunjukkan peningkatan stabil dari 28,973.70 ton pada 2021 menjadi 29,183.87 ton pada 2022, tetapi sedikit menurun menjadi 29,007.54 ton pada 2023. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengurangi dan menangani sampah, jumlah sampah yang dihasilkan terus bertambah setiap tahunnya. Penurunan pengurangan sampah pada 2023 menjadi perhatian khusus, mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengurangi volume sampah

dan meningkatkan penanganannya agar selaras dengan laju pertumbuhan timbulan sampah. Maka dari itu, kebijakan tentang pengelolaan sampah perlu diperhatikan dan dijalankan sebagaimana semestinya oleh semua pihak demi tercapainya tujuan kebijakan.

Penelitian oleh Arisandi (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah responden 98 orang, menemukan bahwa pengimplementasian peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil variabel indikator implementasi kebijakan berada pada kategori kurang baik dengan presentase 54,4% dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor struktur birokrasi dengan persentase sebesar 19,4%. Penelitian lain oleh Handayani & Agussalim (2023) dengan judul penelitian analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah Di Kota Gorontalo dengan pendekatan kualitatif, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong sedang, sebagian masyarakat sudah ikut berpartisipasi namun dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Dari penelitian-penelitian tersebut, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini diperlukan perhatian dan kontribusi dari semua pihak bukan hanya dari pemerintah namun dari masyarakat juga diperlukan agar terwujudnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari lapangan, penulis menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, masih belum optimal. Ketidakefisienan ini ditandai dengan masyarakat yang seharusnya menjaga kebersihan lingkungan justru mengotori lingkungan dengan membuang sampah di sembarangan tempat dan timbulan sampah yang sering kali melebihi kapasitas bak sampah di beberapa lokasi, yang menyebabkan sampah meluap dan mengotori lingkungan sekitar. Masyarakat seringkali tidak memilah sampah mereka, mengakibatkan bercampurnya limbah organik dan anorganik, yang pada gilirannya menyulitkan proses pengelolaan dan daur ulang. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah dan sosialisasi dari pemerintah tentang cara yang benar dalam pengelolaan sampah, memperburuk situasi ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah ini, baik dari sisi infrastruktur, pemeliharaan, maupun kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi atau kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah pengelolaan sampah.

Kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan perilaku masyarakat sebagai variabel kunci dalam analisis implementasi kebijakan di tingkat lokal yang masih sedikit kajian yang mengulas perilaku masyarakat dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah (*gap*) tersebut dengan menganalisis pengaruh perilaku masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Teori perilaku masyarakat oleh Sarwono (2004) yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Teori George C. Edward III dalam (Sutmasa, 2021) keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis

bagaimana perilaku masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah.

2. Kajian Teoritis

KONSEP PERILAKU MASYARAKAT

Perilaku merupakan hasil dari segala bentuk pengalaman serta hubungan manusia dengan lingkungannya yang terbentuk wujud pengetahuan, sikap, dan praktek. Perilaku manusia dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikis, dan aspek sosial. Perilaku manusia bisa artikan sebagai reaksi atau respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat aktif maupun pasif. Respon pasif artinya tidak tampak atau tanpa tindakan, contohnya berpikir ataupun berpendapat. Respon aktif artinya tampak atau melakukan tindakan.

Menurut Sarwono (2004), tiga tingkatan yang membentuk perilaku masyarakat yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan.

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah manusia melakukan pengeinderaan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi enam, sebagai berikut.

- 1) Tahu (*know*) merupakan tahap paling dasar dalam hierarki pengetahuan, di mana seseorang hanya mampu mengingat atau mengulang kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya.
- 2) Memahami (*comprehension*) adalah kemampuan untuk memberikan penjelasan yang akurat mengenai suatu objek atau materi yang sudah dipelajari serta mampu menginterpretasikannya dengan benar.
- 3) Aplikasi (*application*) adalah kemampuan untuk menerapkan materi, teori, atau konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang berbeda secara tepat.
- 4) Analisis (*analysis*) adalah kemampuan untuk memecah suatu materi atau objek ke dalam bagian-bagian terpisah, tetapi tetap mempertahankan hubungan antar komponen dalam struktur yang terorganisasi.
- 5) Sintesis (*synthesis*) merujuk pada kemampuan menggabungkan berbagai bagian atau elemen untuk membentuk struktur atau formulasi baru.
- 6) Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan menilai atau memberikan justifikasi terhadap suatu objek atau materi berdasarkan kriteria tertentu.

b. Sikap

Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam (Fajariyah, 2008), sikap didefinisikan sebagai respons tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau objek tertentu, yang melibatkan unsur perasaan dan pendapat pribadi. Sikap mencakup reaksi emosional seperti rasa suka atau tidak suka, persetujuan atau ketidaksetujuan, serta persepsi positif atau negatif terhadap sesuatu, yang menjadikan sikap sebagai respons

kompleks terhadap faktor-faktor tertentu di sekitarnya. Berbagai tingkatan sikap yaitu:

- 1) Menerima (receiving), tahap menerima berarti seseorang atau subjek bersedia menerima rangsangan yang diberikan oleh suatu objek. Ini mencerminkan keterbukaan awal terhadap informasi atau pengalaman baru, menunjukkan kesediaan untuk terlibat atau mulai memperhatikan objek yang ada.
- 2) Menanggapi (responding), pada tahap menanggapi, individu menunjukkan keterlibatan lebih lanjut dengan memberikan respons atau jawaban terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.
- 3) Menghargai (valuing), berarti bahwa seseorang mulai memberikan penilaian positif terhadap objek atau stimulus.
- 4) Bertanggung jawab (responsibility), tingkat tertinggi dalam sikap adalah bertanggung jawab atas keyakinan yang telah diambil.

c. Tindakan

Suatu sikap tidak langsung terwujud dalam suatu tindakan. Faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan diperlukan untuk mewujudkan sikap menjadi sebuah tindakan nyata, antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak luar. Tindakan atau praktik juga memiliki tingkatan yang mencerminkan proses perkembangan perilaku manusia. Tingkatan tersebut meliputi:

- 1) Persepsi. Pada tahap ini, individu mulai mengenal dan memilih objek atau tindakan yang akan diambil. Ini adalah tahap awal di mana seseorang mulai menyadari berbagai kemungkinan yang ada dan memilih mana yang dianggap tepat atau relevan dengan tujuannya.
- 2) Respon Terpimpin. Setelah mengenal objek atau situasi, individu kemudian melakukan tindakan berdasarkan urutan yang benar atau contoh yang sudah ada. Pada tahap ini, individu mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang diajarkan atau telah diamati sebelumnya untuk melakukan suatu tindakan.
- 3) Mekanisme. Pada tahap ini, tindakan dilakukan secara otomatis atau tanpa banyak pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan. Individu dapat melakukan tindakan tersebut dengan benar dan efisien, seolah-olah tindakan tersebut menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka.
- 4) Adaptasi. Ini adalah tingkatan yang lebih lanjut di mana individu tidak hanya mengikuti kebiasaan atau prosedur yang ada, tetapi dapat mengembangkan dan memodifikasi tindakan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang dihadapi, tanpa mengurangi kebenaran atau efektivitas tindakan tersebut.

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

George C. Edward III dalam (sutmasa, 2021) mengatakan ada empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang baik dan benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya pun akan bisa

dilaksanakan dengan baik dan efektif. ada 3 (tiga) indikator yang dapat dipakai mengukur keberhasilan variabel komunikasi:

- 1) transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula;
- 2) kejelasan: komunikasi yang diterima oleh para implementor haruslah jelas dan tidak membingungkan, ketidakjelasan akan selalu menghalangi efektivitas implementasi;
- 3) konsistensi: perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (tidak berubah-ubah) dan jelas.

B. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya sebagai faktor pendukung. komponen sumber daya menurut Edward III ini adalah:

- 1) staf: staf pelaksana kebijakan publik harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi memadai;
- 2) informasi: ada 2 (dua) jenis informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah;
- 3) wewenang: adalah otoritas formal atau legitimasi bagi para pelaksana untuk memastikan keterukuran dan kepastian suatu implementasi dari aspek legalformal;
- 4) fasilitas: berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus ada untuk terwujudnya implementasi suatu kebijakan publik.

C. Disposisi

Disposisi menyangkut sikap dari pelaksana yang memang harus paralel dan akseptif dengan kebijakan publik itu sendiri. di sini, disposisi tidak hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan melainkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. variabel-variabel disposisi yaitu:

- 1) pengangkatan birokrasi: pemilihan dan pengangkatan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga;
- 2) insentif: memanipulasi insentif untuk memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan penting dilakukan, misalnya dengan cara menambah keuntungan, sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan dengan baik karena kepentingan pribadinya (self interest) terakomodasi.

D. Struktur birokrasi

Kebijakan publik cenderung merupakan sesuatu yang kompleks sehingga menuntut kerjasama baik dari banyak orang. ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan tersedia, maka sumber daya menjadi tidak efektif. birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. untuk mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah melalui SOP (standard operating procedure) dan fragmentasi. salah satu cara melakukan fragmentasi adalah dengan menyebarkan tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

3. Methods

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai dari keluarnya surat izin penelitian. Waktu 2 bulan tersebut akan digunakan untuk mencari informasi dan/atau data di lapangan serta untuk proses penyusunan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh perilaku masyarakat terhadap implementasi kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini, yaitu perilaku masyarakat dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan kuantitatif, data biasanya diperoleh melalui survei, kuesioner, atau observasi yang terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena secara faktual dan terukur (Sugiyono, 2013). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan perilaku masyarakat sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan secara empiris. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan objek dan pokok permasalahan yang akan diteliti yang memerlukan suatu pengamatan dan pemahaman yang cermat dan seksama terhadap objek peneliti.

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian, mencakup manusia, benda, hewan, tumbuhan, fenomena, nilai tes, atau kejadian-kejadian yang berfungsi sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu yang relevan dalam suatu penelitian (Damanik, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan jumlah 59.730 penduduk. Sampel secara sederhana didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data utama dalam sebuah penelitian (Adnyana, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*, dimana seluruh populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *simple random sampling* yaitu dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan karakteristik tertentu pada setiap anggota populasi. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus slovin (Santoso, 2023), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2} \quad (1)$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat kesalahan, 10%

maka:

$$n = 59.730 / (1 + 59.730 \cdot [(0,1)]^2)$$

$$n = 59.730 / (1 + 59.730 \cdot 0,01)$$

$$n = 59.730 / (1 + 597,3)$$

$$n = 59.730 / 598,3$$

$$n = 99,8$$

Jadi, ukuran sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan IBM SPSS 25. Adapun tahapannya yaitu uji kualitas data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen penelitian, analisis statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data, uji t untuk melihat pengaruh suatu variabel independen dengan variabel dependen, dan analisis regresi linear sederhana untuk menunjukkan bahwa perilaku masyarakat memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan.

3. Results and Discussion

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan sebesar 34,1% sedangkan 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

a. Indikator Perilaku Masyarakat

- 1) Pengetahuan : Rata-rata persentase pengetahuan sebanyak 58,1% yang diperoleh dari dua pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang pengelolaan sampah masih belum dipahami oleh masyarakat.
- 2) Sikap : Rata-rata persentase sebesar 55,2% yang diperoleh dari dua pertanyaan, menunjukkan bahwa masyarakat kurang mendukung implementasi peraturan daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini.
- 3) Tindakan : Rata-rata persentase sebesar 48% diperoleh dari dua pertanyaan yang merupakan persentase terendah dari indikator perilaku masyarakat. Hal ini ditandakan dengan masyarakat yang masih membuang sampah di sembarangan tempat dan tidak memilah sampah mereka sebelum dibawa ke TPS.

b. Indikator Implementasi Kebijakan

- 1) Komunikasi : Rata-rata persentase sebesar 58,5% diperoleh dari dua pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah masih kurang baik.
- 2) Sumber daya : Rata-rata persentase sebesar 56,9% diperoleh dari dua pertanyaan. Sumber daya yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat berupa fasilitas pengelolaan sampah. Namun, dalam hal ini fasilitas yang diberikan pemerintah masih kurang baik.
- 3) Disposisi : Rata-rata persentase sebesar 61,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi : rata-rata persentase sebesar 62,4%, menunjukkan bahwa koordinasi antar pegawai atau instansi pemerintah dalam mengelola sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berada pada kategori “Baik”.

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $7,127 > 1,661$ yang artinya H_a diterima dengan kata lain perilaku masyarakat berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Perilaku merupakan hasil dari segala bentuk pengalaman serta hubungan manusia dengan lingkungannya yang terbentuk wujud pengetahuan, sikap, dan praktek. Menurut Sarwono (2004), tiga tingkatan yang membentuk perilaku masyarakat yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Relevan dengan hal itu dilihat dari hasil olahan data ditemukan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan yang diperoleh dari dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 58,1%, sikap yang diperoleh dari dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 55,2%, dan tindakan yang diperoleh dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 48%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dimana rata-rata persentase ketiga indikator tersebut sebesar 53,76% atau berada pada kategori “Kurang Baik”

George C. Edward III dalam (Sutmasa, 2021) mengatakan ada empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Relevan dengan hal itu dilihat dari hasil olahan data ditemukan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi diperoleh dari dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 58,5%, sumber daya yang diperoleh dari dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 56,9%, disposisi yang diperoleh dua pertanyaan dengan rata-rata persentase sebesar 61,8%, dan struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 62,4%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana rata-rata persentase keempat indikator tersebut sebesar 59,54% atau berada pada kategori “Kurang Baik”.

Hasil penelitian ini mendukung teori perilaku masyarakat oleh Sarwono (2004) yang mengukur perilaku masyarakat berdasarkan dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam (Sutmasa, 2021) yang mengatakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah serta mematuhi aturan terkait pembuangan dan pemilahan sampah. Selain itu, kepada pemerintah daerah Kabupaten Pinrang juga diharapkan agar meningkatkan

sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah, memastikan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi kebijakan.

4. Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perilaku masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 53,76% atau berada pada kategori “Kurang Baik”. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yaitu sebesar 59,54% atau berada pada kategori “Kurang Baik”. Setelah dilakukan analisis perilaku masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ditemukan terdapat pengaruh signifikan. Perilaku masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan sebesar 34,1% sedangkan 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan agar terwujudnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah yang lebih efektif. Aspek yang perlu ditingkatkan yaitu tindakan yang memiliki persentase lebih rendah dibanding pengetahuan dan sikap. Selain itu, aspek sumber daya juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar. Maka dari itu, diperlukan perhatian dan kontribusi dari semua pihak bukan hanya dari pemerintah namun dari masyarakat juga diperlukan agar terwujudnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah yang lebih efektif.

References

- Adnyana, I. M. D. M. (2021). Populasi dan Sampel. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Arisandi, R. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah AdministrasiJurnail Ilmu Administrasi*.
- Damanik, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Issue March).
- Fajariyah, D. N. (2008). Sikap Dan Perilaku Merokok Dosen. *Fkm Ui*, 13–20. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123427-S-5454-Sikap dan-HA.pdf>
- Fildzah, S. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 60–70. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i1.6145>
- Oktavianti, P. M. (2021). *HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG COVID-19 DENGAN SIKAP REMAJA DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. 8–21.
- Santoso, A. (2023). Rumus Slovin: Panacae Masalah Ukuran Sampel. *Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*.
- Sarwono, S. W. (2004). *Psikologi Remaja*. CV Rajawali.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta*. CV. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>